PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 WIKA Tower 1&2, Jakarta 13340
(+6221) 8067 9200
adwijaya@wika.co.id
www.wika.co.id

Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00219/2025 23 Agustus 2025
Lampiran : 1 Halaman

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan Kelalaian Obligasi dan Sukuk Mudharabah**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya kelalaian tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") sebagai berikut:

- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022;
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022;
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021;
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021.

Bersama ini Perseroan menyampaikan bukti Iklan Pemberitahuan Kelalaian Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang telah dipublikasikan melalui Surat Kabar Harian Terbit pada hari Jumat, 22 Agustus 2025 sebagaimana terlampir

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat,

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Ngatemin
Corporate Secretary

Tembusan :
Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia

Mentan Amran Ungkap Terkait Beras Satu Harga Guna Melindungi Subsidi

Jakarta, HanTer - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menerangkan bahwa beras satu harga, bertujuan untuk mengunci harga dari seluruh beras yang disubsidi oleh pemerintah agar tidak disalahgunakan oleh swasta.

"Kami ingin mengunci seluruh beras yang disubsidi negara. Itu harus dikontrol, diintervensi," ucap Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV yang membidangi pertanian di Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Dijelaskannya abahwa pemerintah sudah melaksanakan rapat koordinasi terbatas terkait dengan beras satu harga sekitar 3–4 kali.

Adapun yang menjadi pertimbangan dari pemberlakuan beras satu harga adalah tingginya subsidi pangan yang berada di angka Rp164,4 triliun.

Amran tidak ingin subsidi tersebut digunakan oleh pengusaha swasta untuk meraup keuntungan setinggi-tingginya.

Apabila pengusaha swasta ingin menuai untung dari penjualan berasnya dengan menetapkan harga yang lebih tinggi, Amran mempersilakan dengan syarat beras tersebut berasal dari lahan sawahnya sendiri, bukan yang disubsidi oleh pemerintah.

"Kalau swasta nanti mau membangun, korporasi-korporasinya mau membangun atau cetak sawah sendiri, kami tidak ikut campur (harga). Tapi tidak boleh menggunakan subsidi pemerintah, baik traktor, benih, dan pupuk," ungkapnya.

Kendati demikian, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto meminta kepada Amran untuk tidak terburu-buru dalam menerapkan kebijakan beras satu harga.

Titiek memperingatkan bahwa kebijakan tersebut akan memengaruhi hajat hidup orang banyak, sehingga harus dilakukan dengan hati-hati dan pertimbangan yang matang.

"Nanti kalau diterapkan (beras) satu harga, tahunya tidak cocok, nanti Presiden harus mencabut (aturan) lagi," ujar Titiek.

Sebelumnya, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan untuk beras biasa hanya akan ada satu harga eceran tertinggi (HET), tak lagi ada HET medium atau HET premium.

■ Danial

AGUS GUMIWANG: NILAI EKSPOR ALAS KAKI INDONESIA CAPAI 3,77 MILIAR DOLAR AS

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan nilai ekspor alas kaki Indonesia sudah mencapai 3,77 miliar dolar AS sehingga menempatkan Indonesia sebagai eksportir terbesar keenam dunia.

ISTIMEWA

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Batang, HanTer - "Keberhasilan ekspor sepatu Converse ini membuktikan bahwa Indonesia mampu menghasilkan produk dengan standar kualitas global," katanya pada acara pelepasan ekspor sepatu merek Converse dari PT Yih Quan Footwear Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (20/8/2025).

Menurut dia, pencapaian PT Yih Quan Footwear Indonesia merupakan bukti nyata keberhasilan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang.

Selain aspek ekspor, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang juga menyoroti dampak positif sektor alas kaki di KEK Batang terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.

"Sejak Februari 2025 jumlah pekerja di industri ini sudah meningkat sekitar 35 persen dibanding tahun sebelumnya," katanya.

Ia mengatakan Pemerintah terus mendorong penguatan industri manufaktur nasional dengan menghadirkan program insentif di antaranya subsidi bunga kredit sebesar 5 persen bagi pelaku usaha di sektor industri.

Pemerintah berharap langkah ekspor dari PT Yih Quan Footwear Indonesia tidak hanya memperluas pasar tetapi juga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara.

"Dengan dukungan KEK Industropolis Batang, Indonesia diharapkan semakin diperhitungkan dalam rantai pasok global untuk produk merek-merek kelas dunia," katanya.

Sebanyak 20.000 pasang sepatu merek Converse yang seluruhnya dibuat di pabrik KEK Industropolis Batang dikirim ke dua pasar strategis yaitu Amerika Serikat dan Australia.

Converse merupakan merek ternama yang dimiliki perusahaan global Nike, Inc. asal Amerika Serikat, yang sejak lama mempercayakan proses produksinya kepada mitra manufaktur di Indonesia.

Tidak hanya untuk pasar Amerika Serikat dan Australia, PT Yih Quan Footwear Indonesia juga telah menembus distribusi ke 37 negara lain seperti Belgia, Meksiko, Kanada, dan Australia.

■ Danial

Menkeu Koreksi Tunjangan Guru/Dosen Jadi Rp274,7 Triliun RAPBN 2026

Jakarta, HanTer - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengoreksi anggaran pendidikan untuk guru, dosen, dan tenaga pendidik dari sebelumnya Rp178,7 triliun menjadi Rp274,7 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

"Anggaran pendidikan yang langsung dinikmati oleh dosen, guru, dan tenaga pendidik adalah Rp274,7 triliun," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Sebelumnya, dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Jumat (15/8), Sri Mulyani memaparkan anggaran pendidikan untuk guru, dosen, dan tenaga pendidikan adalah sebesar Rp178,7 triliun.

Perbedaan terletak pada penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) aparatur sipil negara (ASN) daerah dari sebelumnya Rp68,7 triliun menjadi Rp69 triliun.

Kemudian, perbedaan signifikan terlihat pada TPG pegawai negeri sipil (PNS), tunjangan profesi dosen (TPD) PNS, dan gaji pendidik dari sebelumnya Rp82,9 triliun menjadi Rp120,3 triliun.

Sementara itu TPG non-PNS dan TPD non-PNS masih sama dengan masing-masing sebesar Rp19,2 triliun dan Rp3,2 triliun.

Saat dikonfirmasi oleh ANTARA di Jakarta, Kamis, Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman menjelaskan perubahan itu disebabkan masih ada komponen yang belum masuk perhitungan dalam paparan Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026.

"Perhitungan sebelumnya belum memasukkan semua komponen belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan guru, dosen, dan tenaga kependidikan di semua daerah," ujar Luky.

ISTIMEWA

SRI MULYANI INDRAWATI

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan anggaran pendidikan dijaga untuk tetap mencakup 20 persen dari APBN. Untuk RAPBN 2026, nilainya mencapai Rp757,8 triliun.

Rinciannya, belanja pendidikan yang disalurkan melalui transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp253,4 triliun. Belanja ini ditujukan untuk tunjangan guru negeri/swasta, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), BOP Kesetaraan, hingga tambahan penghasilan guru.

Anggaran yang disalurkan melalui K/L yaitu sebesar Rp243,9 triliun dan dibelanjakan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Sosial (Kemensos).

Penyaluran berikutnya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menerima Rp223,6 triliun dari anggaran pendidikan. Penyaluran MBG melalui pos belanja pendidikan diarahkan untuk 71,9 juta siswa dan santri di seluruh Indonesia.

Terakhir, belanja pendidikan juga dialokasikan untuk pembiayaan sebesar Rp37 triliun. Pembiayaan ini disalurkan untuk berbagai program, seperti beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk 4.000 mahasiswa, 452 riset, serta 21 perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN BH) eksisting dan 2 PTN BH baru.

Belanja pembiayaan juga digunakan untuk dukungan pendidikan 9 sekolah unggulan dan revitalisasi 11.686 sekolah.

■ Danial

Menko Pangan Zulhas Pastikan Serap 1.000 Ton Gula Petani

Jakarta, HanTer - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan penyerapan 1.000 ton gula petani di Lumajang akan segera dilakukan dalam waktu satu hingga dua hari ke depan.

"Kita tidak ingin petani menjerit karena harga gula turun. Oleh karena itu, gula yang ada di Lumajang akan segera diserap," ujar Zulkifli Hasan usai Rapat Konsolidasi Program Prioritas Nasional Bidang Pangan di Surabaya, Kamis (21/8/2025).

Zulhas menjelaskan pembelian gula tersebut akan dilakukan baik oleh Pemerintah Kabupaten maupun pihak swasta.

"Saya sudah kasih waktu, besok-besok akan dibeli. Kalau tidak selesai, bupati sudah saya kasih nomor telepon dan boleh protes," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Zulkifli juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan dalam mengelola energi, pangan bergizi, hingga mempercepat pembentukan organisasi koperasi di tingkat kelurahan.

Menurut dia, Jawa Timur selama ini selalu menjadi daerah yang konsisten dalam menjaga ketahanan pangan dan menjadi teladan bagi wilayah lain.

"Alhamdulillah Jawa Timur ini selalu menjadi yang terbaik, semangat dan kekompakan masyarakatnya luar biasa," katanya.

Zulkifli menambahkan pemerintah terus berkomitmen menjaga kestabilan harga pangan sekaligus memastikan kesejahteraan petani di semua daerah di Indonesia.

■ Danial

PEMBERITAHUAN KELALAIAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2022

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47 tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat dihadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, (**"Perjanjian Perwaliamanatan"**), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 bahwa PT Wijaya Karya (Persero) Tbk **telah lalai dalam memenuhi kewajiban keuangan dalam Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2024 *(audited)* dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki dalam batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, akan segera melakukan tindakan-tindakan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Jakarta, 22 Agustus 2025

WALI AMANAT

BANKMEGA

PT BANK MEGA TBK

PEMBERITAHUAN KELALAIAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2022

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51 tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat dihadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, (**"Perjanjian Perwaliamanatan"**), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 bahwa PT Wijaya Karya (Persero) Tbk **telah lalai dalam memenuhi kewajiban keuangan dalam Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2024 *(audited)* dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki dalam batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, akan segera melakukan tindakan-tindakan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Jakarta, 22 Agustus 2025

WALI AMANAT

BANKMEGA

PT BANK MEGA TBK

PEMBERITAHUAN KELALAIAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7 tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (**"Perjanjian Perwaliamanatan"**), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 bahwa PT Wijaya Karya (Persero) Tbk **telah lalai dalam memenuhi kewajiban keuangan dalam Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2024 *(audited)* dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki dalam batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, akan segera melakukan tindakan-tindakan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Jakarta, 22 Agustus 2025

WALI AMANAT

BANKMEGA

PT BANK MEGA TBK

PEMBERITAHUAN KELALAIAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36 tanggal 22 September 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (**"Perjanjian Perwaliamanatan"**), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 bahwa PT Wijaya Karya (Persero) Tbk **telah lalai dalam memenuhi kewajiban keuangan dalam Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2024 *(audited)* dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki dalam batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, akan segera melakukan tindakan-tindakan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Jakarta, 22 Agustus 2025

WALI AMANAT

BANKMEGA

PT BANK MEGA TBK

PEMBERITAHUAN KELALAIAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 3 tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (**"Perjanjian Perwaliamanatan"**), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 bahwa PT Wijaya Karya (Persero) Tbk **telah lalai dalam memenuhi kewajiban keuangan dalam Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2024 *(audited)* dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki dalam batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, akan segera melakukan tindakan-tindakan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Jakarta, 22 Agustus 2025

WALI AMANAT

BANKMEGA

PT BANK MEGA TBK